

# ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KUR TERHADAP KEMISKINAN PADA TAHUN 2015-2021

Alan Stasenri Lengkonu, Alfian Bayu Krisna Mukti, Bahrizalsyah Alba Suryalaksana,  
Rizky Diananto, Suranto  
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah

## **Abstract**

***Kredit Usaha Rakyat (KUR) until 2021 is still uneven and only focuses on the wholesale and retail trade sector. The purpose of this study was to determine the effect of the spread of KUR on poverty in 2015-2021. This study uses a quantitative approach with data sources in the form of the 2022 DDAC data collection and poverty data from the BPS website. The results of the study of the five largest sectors in the distribution of poverty KUR are the manufacturing sector and the provision of food services, which have no significant effect on assistance from the wholesale and retail trade sector, agriculture, hunting and forestry sectors, and the entertainment service sector, socio-cultural entertainment, and other individuals have a significant effect on poverty. The conclusion of this study is that KUR in the last two sectors can reduce poverty. This research is a productive effort to examine KUR from the trade sector to sectors, such as agriculture and services because it has high leverage and absorption of labor and increased exports.***

## **Abstrak**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga tahun 2021 masih belum merata dan hanya terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penyaluran KUR terhadap kemiskinan pada tahun 2015-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data berupa data set DDAC 2022 dan data kemiskinan dari *website* BPS. Hasil penelitian lima sektor terbesar dalam penyaluran KUR terhadap kemiskinan adalah sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum tidak signifikan terhadap kemiskinan sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya hiburan, dan perorangan lainnya berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kesimpulan dari penelitian ini penyaluran KUR pada dua sektor terakhir dapat menurunkan kemiskinan. Penelitian ini menyarankan pemerintah hendaknya mengalihkan penyaluran KUR dari sektor perdagangan menuju sektor produktif, seperti pertanian dan jasa kemasyarakatan karena memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta peningkatan ekspor.

**Keywords:** KUR, Kemiskinan, UMKM

## PENDAHULUAN

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting, hal ini ditandai dengan kemampuan UMKM sebagai penyelamat pemulihan ekonomi pada krisis tahun 1997. UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional (Widyaresti, 2012). Saat krisis ekonomi, usaha kecil menengah terbukti mampu menampung 99,45 persen dari total tenaga kerja atau 73,24 juta tenaga kerja (Bank Indonesia, 2015).

Selain dilihat dari kemampuan UMKM dalam menampung jumlah tenaga kerja yang banyak, kuantitas UMKM yang banyak di Indonesia juga menjadi alasan mengapa UMKM kebal terhadap krisis. Hyland et al (2000) mengemukakan bahwa usaha kecil kebanyakan tidak memiliki strategi atau kekurangan ahli strategi. Hal ini yang menyebabkan UMKM sulit berkembang. Kinerja UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama dan mendasar yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), aspek keuangan, aspek teknis produksi dan aspek pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga sosial masyarakat (LSM). Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan dan memperluas UMKM dalam perekonomian nasional diperlukan serangkaian pembinaan yang bersumber pada masalah

keterbatasan pengetahuan, informasi, dan terbatasnya akses permodalan.

Melihat berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi oleh UMKM, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjamin dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa jaminan KUR sebesar 70 persen ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pembangunan Usaha dan 30 persen ditutup oleh bank pelaksana.

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yang memiliki tujuan menyalurkan kredit agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor UMKM agar mudah dalam akses modal kerja, pemerintah meluncurkan program subsidi kredit dengan syarat ringan dan

bunga rendah pada 5 November 2007. Program tersebut diperuntukkan memberi modal usaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang memiliki usaha layak untuk dibiayai namun belum bankable, artinya UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan bank.

Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,34%. Sesuai data Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,99%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,68%. Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. (Kemenko Perekonomian, 2018).

Rincian usaha produktif dan layak per sektor ekonomi sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

- I. Sektor yang dibiayai KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Penempatan TKI (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)
  1. Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan:  
Seluruh usaha di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (sektor 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
  2. Sektor Kelautan dan Perikanan:  
Seluruh usaha di sektor kelautan dan perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan).
  3. Sektor Industri Pengolahan:  
Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
  4. Sektor Konstruksi:  
Seluruh usaha di sektor Konstruksi (sektor 6), termasuk konstruksi perumahan, konstruksi gedung, bangunan perairan, dll.
  5. Sektor Perdagangan:  
Seluruh usaha di sektor perdagangan besar dan eceran (sektor 7), termasuk kuliner dan pedagang eceran.
- II. Sektor yang dibiayai KUR Khusus (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi) adalah Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (sektor 1) dan sektor kelautan dan perikanan (sektor 2), untuk usaha:
  - a. Perkebunan Rakyat, khususnya untuk pembiayaan peremajaan, dengan komoditas seperti: kelapa sawit, karet, cengkeh, kelapa,

kakao, kopi, teh, pala, lada, tebu, dan tembakau.

- b. Peternakan Rakyat, khususnya untuk usaha penggemukan ternak dan ternak perah.
- c. Komoditas Perikanan Rakyat, akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Teknis sepanjang sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku.

### **Penelitian Terdahulu**

Iliati Iztiyar (2018), dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil, dan Perekonomian di Indonesia". Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran dana KUR

### **Rumusan Permasalahan**

Penyaluran KUR yang dimulai sejak tahun 2007 telah mengalami perkembangan baik secara ketentuan perundangan maupun pelaksanaan penyaluannya. Penyaluran KUR terdiri dari beberapa sektor, namun terdapat 5 sektor yang mencapai porsi lebih dari 90% dari total penyaluran pada tahun 2015-2021. Sektor-sektor tersebut antara lain: Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran merupakan sektor penyaluran KUR yang paling besar jika dibanding dengan sektor lain. Di satu sisi, sektor tersebut dapat mendorong perekonomian di daerah secara cepat namun di sisi lain

penyaluran kredit di sektor tersebut kurang memberikan nilai tambah dan kurang menyerap tenaga kerja di Indonesia, dan dapat memicu inflasi yang bisa berakibat menurunnya pendapatan riil masyarakat. Jika dilihat dari penyalurannya, KUR memiliki ketidaktepatan dalam debitur KUR terutama untuk tujuan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh KUR Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh KUR Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan terhadap kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh KUR Sektor Industri Pengolahan terhadap kemiskinan?
4. Bagaimana pengaruh KUR Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, terhadap kemiskinan?
5. Bagaimana pengaruh KUR Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya terhadap kemiskinan?

### **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyaluran KUR terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2021.

### **Hipotesis Penulisan**

Hipotesis yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Penyaluran KUR Sektor Perdagangan Besar dan Eceran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
2. Penyaluran KUR Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. Penyaluran KUR Sektor Industri Pengolahan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
4. Penyaluran KUR Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
5. Penyaluran KUR Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Menurut Semara Putra (2013) dalam Iztihar (2018), KUR yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi Pemberian. Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah: (1) mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM), (2) meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan, (3) sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dari definisi-definisi KUR dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang usahanya layak untuk mendapatkan bantuan kredit atau pembiayaan dari kreditur. Sasaran KUR adalah koperasi dan UMKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan. Tujuan akhir program KUR adalah meningkatkan perekonomian, mempercepat pengembangan sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Adanya intermediasi perbankan akan mempermudah akses permodalan bagi pihak kekurangan dana. Masyarakat yang kekurangan dana dapat memperoleh akses modal dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidupnya. Pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Dengan adanya kredit ini maka akan membuat produktivitas sebuah usaha menjadi meningkat, selain itu dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha yang mana dapat berimbas pada perluasan lapangan kerja dan pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja serta meningkatkan output yang dihasilkan oleh usaha tersebut.

Dalam Teori Lingkaran Kemiskinan (Nurkse, 1953) dalam Iztihar (2018) dijelaskan bahwa kemiskinan dapat bermula dalam kondisi apapun baik itu karena adanya ketimpangan, produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah ataupun tingkat tabungan dan investasi yang rendah. Dalam penelitian ini kemiskinan diasumsikan dimulai karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang pada akhirnya berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran kemiskinan, Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini, Nurkse mengatakan inti dari lingkaran

kemiskinan ini adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak, pembentukan modal ditentukan oleh tabungan dan di pihak lain ditentukan oleh perangsang untuk menanam modal.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai adalah kuantitatif. Menurut Kuncoro (2003) metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data, data ini diproses dan disajikan menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan data sekunder pada tahun 2015-2021 yang bersumber dari Dataset DDAC 2022 dan website BPS.

Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian diinterpretasikan dalam suatu uraian. Peneliti menggunakan analisis regresi data panel untuk mengolah hasil penelitian tersebut.

Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X1_{it} + \varepsilon$$

$$Y_{it} = \alpha + X2_{it} + \varepsilon$$

$$Y_{it} = \alpha + X3_{it} + \varepsilon$$

$$Y_{it} = \alpha + X4_{it} + \varepsilon$$

$$Y_{it} = \alpha + X5_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

$X1_{it}$  = KUR Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rupiah)

$X_{2it}$  = KUR Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (rupiah)  
 $X_{3it}$  = KUR Sektor Industri Pengolahan (rupiah)  
 $X_{4it}$  = KUR Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (rupiah)  
 $X_{5it}$  = KUR Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya (rupiah)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Tabel 1

Hasil Regresi Data Jumlah Penduduk Miskin dan KUR Sektor Industri Pengolahan

Variabel (Y1)	Variabel (X)	Prob	Coefficient	Keterangan
Jumlah Penduduk Miskin	Konstanta	0.0000	6.084048	Signifikan
	KUR Sektor Industri Pengolahan	0.6490	-0.002267	Tidak Signifikan
	<b>Fixed effect</b>		<b>Coefficient</b>	
	BALI		-0.802881	
	BANTEN		0.551998	
	BENGKULU		-0.301328	
	DI YOGYAKARTA		0.133418	
	DKI JAKARTA		-0.015272	
	GORONTALO		-0.765014	
	JAMBI		-0.372022	
	JAWA BARAT		2.252097	
	JAWA TENGAH		2.299273	
	JAWA TIMUR		2.374051	
	KALIMANTAN BARAT		-0.092126	
	KALIMANTAN SELATAN		-0.759785	
	KALIMANTAN TENGAH		-1.094122	
	KALIMANTAN TIMUR		-0.622411	
	KALIMANTAN UTARA		-2.160716	
	KEP BANGKA BLT		-1.776667	
	KEPULAUAN RIAU		-1.179713	
	LAMPUNG		0.957662	
	MALUKU		-0.265039	
	MALUKU UTARA		-1.642067	
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM		0.702560	
	NUSA TENGGARA BARAT		0.594906	
	NUSA TENGGARA TIMUR		1.017878	
	PAPUA		0.789007	
	PAPUA BARAT		-0.650310	
	RIAU		0.193261	
	SULAWESI BARAT		-0.991463	
	SULAWESI SELATAN		0.658474	
	SULAWESI TENGAH		-0.020860	
	SULAWESI TENGGARA		-0.265110	
	SULAWESI UTARA		-0.750901	
	SUMATERA BARAT		-0.152606	
	SUMATERA SELATAN		0.972905	
	SUMATERA UTARA		1.182924	

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada konstanta adalah 0,000 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut menandakan bahwa jika nilai KUR sektor industri pengolahan dianggap 0 maka diasumsikan jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 6,08%. Sedangkan jika dilihat pada variabel KUR sektor industri pengolahan dengan nilai probabilitas 0,649 yang berarti tidak signifikan pada alpha 5%, hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan KUR pada sektor tersebut sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0,0022%. Hasil penelitian menjelaskan bahwa KUR sektor industri pengolahan memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin namun tidak signifikan.

Tabel 2

Hasil Regresi Data Jumlah Penduduk Miskin dan KUR Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Variabel (Y1)	Variabel (X)	Prob	Coefficient	Keterangan
Jumlah Penduduk Miskin	Konstanta	0.0000	6.186335	Signifikan
	KUR Sektor Penyediaan Akomodasi	0.0933	-0.006436	Tidak Signifikan
	<b>Fixed effect</b>		<b>Coefficient</b>	
	BALI		-0.797497	
	BANTEN		0.559754	
	BENGKULU		-0.307162	
	DI YOGYAKARTA		0.135915	
	DKI JAKARTA		-0.004926	
	GORONTALO		-0.773868	
	JAMBI		-0.375082	
	JAWA BARAT		2.261564	
	JAWA TENGAH		2.305120	
	JAWA TIMUR		2.381570	
	KALIMANTAN BARAT		-0.092672	
	KALIMANTAN SELATAN		-0.761915	
	KALIMANTAN TENGAH		-1.096577	
	KALIMANTAN TIMUR		-0.618915	
	KALIMANTAN UTARA		-2.168767	
	KEP BANGKA BLT		-1.783149	
	KEPULAUAN RIAU		-1.179793	
	LAMPUNG		0.953577	
	MALUKU		-0.264803	
	MALUKU UTARA		-1.645615	
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM		0.699705	
	NUSA TENGGARA BARAT		0.592267	
	NUSA TENGGARA TIMUR		1.017704	
	PAPUA		0.790738	

	PAPUA BARAT	-0.653807
	RIAU	0.193992
	SULAWESI BARAT	-0.999010
	SULAWESI SELATAN	0.661086
	SULAWESI TENGAH	-0.022047
	SULAWESI TENGGARA	-0.265230
	SULAWESI UTARA	-0.748729
	SUMATERA BARAT	-0.153477
	SUMATERA SELATAN	0.973392
	SUMATERA UTARA	1.186657

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada konstanta adalah 0,000 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut menandakan bahwa jika nilai KUR sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dianggap 0 maka diasumsikan jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 6,18%. Sedangkan jika dilihat pada variabel KUR sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan nilai probabilitas 0,09 yang berarti tidak signifikan pada alpha 5%, hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan KUR pada sektor tersebut sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0,0064%. Hasil penelitian menjelaskan bahwa KUR sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin namun tidak signifikan.

Tabel 3  
Hasil Regresi Data Jumlah Penduduk  
Miskin dan KUR Sektor Jasa  
Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan  
dan Perorangan Lainnya

Variabel (Y1)	Variabel (X)	Prob	Coefficient	Keterangan
Jumlah Penduduk Miskin	Konstanta	0.0000	6.139458	Signifikan
	KUR Sektor Jasa Kemasyarakatan	0.0433	-0.004532	Signifikan
	<b>Fixed effect</b>		<b>Coefficient</b>	
	BALI		-0.802227	
	BANTEN		0.553850	
	BENGKULU		-0.303071	
	DI YOGYAKARTA		0.134451	
	DKI JAKARTA		-0.011469	
	GORONTALO		-0.766793	
	JAMBI		-0.371189	
	JAWA BARAT		2.256486	
	JAWA TENGAH		2.303769	
	JAWA TIMUR		2.379052	
	KALIMANTAN BARAT		-0.093266	
	KALIMANTAN SELATAN		-0.758402	

	KALIMANTAN TENGAH	-1.094965
	KALIMANTAN TIMUR	-0.619808
	KALIMANTAN UTARA	-2.164224
	KEP BANGKA BLT	-1.779276
	KEPULAUAN RIAU	-1.179330
	LAMPUNG	0.957457
	MALUKU	-0.267756
	MALUKU UTARA	-1.647265
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0.702878
	NUSA TENGGARA BARAT	0.593403
	NUSA TENGGARA TIMUR	1.013757
	PAPUA	0.788429
	PAPUA BARAT	-0.652305
	RIAU	0.194724
	SULAWESI BARAT	-0.993994
	SULAWESI SELATAN	0.661125
	SULAWESI TENGAH	-0.021525
	SULAWESI TENGGARA	-0.265843
	SULAWESI UTARA	-0.752923
	SUMATERA BARAT	-0.153665
	SUMATERA SELATAN	0.973839
	SUMATERA UTARA	1.186075

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada konstanta adalah 0,000 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut menandakan bahwa jika nilai KUR sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya dianggap 0 maka diasumsikan jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 6,13%. Sedangkan jika dilihat pada variabel KUR sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya dengan nilai probabilitas 0,04 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan KUR pada sektor tersebut sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0,0045%. Hasil penelitian menjelaskan bahwa KUR sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel 4  
Hasil Regresi Data Jumlah Penduduk  
Miskin dan KUR Sektor Perdagangan

Variabel (Y1)	Variabel (X)	Prob	Coefficient	Keterangan
Jumlah Penduduk Miskin	Konstanta	0.0000	5.804729	Signifikan
	KUR Sektor Perdagangan	0.0202	0.005745	Signifikan
	<b>Fixed effect</b>		<b>Coefficient</b>	
	BALI		-0.812766	
	BANTEN		0.549682	
	BENGKULU		-0.295200	



	DI YOGYAKARTA	0.126784
	DKI JAKARTA	-0.024798
	GORONTALO	-0.758894
	JAMBI	-0.369910
	JAWA BARAT	2.234006
	JAWA TENGAH	2.276274
	JAWA TIMUR	2.354202
	KALIMANTAN BARAT	-0.090330
	KALIMANTAN SELATAN	-0.763084
	KALIMANTAN TENGAH	-1.090252
	KALIMANTAN TIMUR	-0.618449
	KALIMANTAN UTARA	-2.138578
	KEP BANGKA BLT	-1.754537
	KEPULAUAN RIAU	-1.175157
	LAMPUNG	0.954652
	MALUKU	-0.257332
	MALUKU UTARA	-1.620916
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0.702172
	NUSA TENGGARA BARAT	0.592564
	NUSA TENGGARA TIMUR	1.019748
	PAPUA	0.791015
	PAPUA BARAT	-0.638095
	RIAU	0.192403
	SULAWESI BARAT	-0.984394
	SULAWESI SELATAN	0.650319
	SULAWESI TENGAH	-0.019543
	SULAWESI TENGGARA	-0.264706
	SULAWESI UTARA	-0.748172
	SUMATERA BARAT	-0.160401
	SUMATERA SELATAN	0.968816
	SUMATERA UTARA	1.172875

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada konstanta adalah 0,000 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut menandakan bahwa jika nilai KUR sektor perdagangan dianggap 0 maka diasumsikan jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 5,80%. Sedangkan jika dilihat pada variabel KUR sektor perdagangan dengan nilai probabilitas 0,02 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan KUR pada sektor tersebut sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,0057%. Hasil penelitian menjelaskan bahwa KUR sektor perdagangan meningkatkan jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Tabel 5  
Hasil Regresi Data Jumlah Penduduk Miskin dan KUR Sektor Pertanian

Variabel (Y1)	Variabel (X)	Prob	Coefficient	Keterangan
Jumlah Penduduk Miskin	Konstanta	0.0000	6.253349	Signifikan
	KUR Sektor Pertanian	0.0539	-0.008545	Signifikan
	Fixed effect		Coefficient	
	BALI		-0.801229	

	BANTEN	0.531201
	BENGKULU	-0.295504
	DI YOGYAKARTA	0.128577
	DKI JAKARTA	-0.031302
	GORONTALO	-0.771226
	JAMBI	-0.360808
	JAWA BARAT	2.257814
	JAWA TENGAH	2.313686
	JAWA TIMUR	2.390991
	KALIMANTAN BARAT	-0.089866
	KALIMANTAN SELATAN	-0.754812
	KALIMANTAN TENGAH	-1.091636
	KALIMANTAN TIMUR	-0.623187
	KALIMANTAN UTARA	-2.175103
	KEP BANGKA BLT	-1.778441
	KEPULAUAN RIAU	-1.196458
	LAMPUNG	0.970711
	MALUKU	-0.275335
	MALUKU UTARA	-1.661108
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0.704117
	NUSA TENGGARA BARAT	0.600840
	NUSA TENGGARA TIMUR	1.012635
	PAPUA	0.784489
	PAPUA BARAT	-0.666905
	RIAU	0.207600
	SULAWESI BARAT	-0.991667
	SULAWESI SELATAN	0.670977
	SULAWESI TENGAH	-0.017352
	SULAWESI TENGGARA	-0.266627
	SULAWESI UTARA	-0.755723
	SUMATERA BARAT	-0.145951
	SUMATERA SELATAN	0.982524
	SUMATERA UTARA	1.194079

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada konstanta adalah 0,000 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut menandakan bahwa jika nilai KUR sektor pertanian dianggap 0 maka diasumsikan jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 6,25%. Sedangkan jika dilihat pada variabel KUR sektor perdagangan dengan nilai probabilitas 0,05 yang berarti signifikan pada alpha 5%, hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan KUR pada sektor tersebut sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0,0085%. Hasil penelitian menjelaskan bahwa KUR sektor pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

**Tabel 6**  
**Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Variabel Terikat(Y)	Variabel Bebas(X)	R-Square	R-adjusted
Jumlah Penduduk Miskin(Kemiskinan)	Sektor Industri Pengolahan (IP)	0.997266	0.996808
	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Akomodasi)	0.997301	0.996849
	Sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya (Jasa_Kemasyarakatan)	0.997318	0.996889
	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	0.997335	0.996889
	Sektor Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan (Pertanian)	0.997313	0.996867

Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 pada tiap variabel independen menunjukkan semakin tinggi kemampuan variabel dalam model untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen.

### Pembahasan

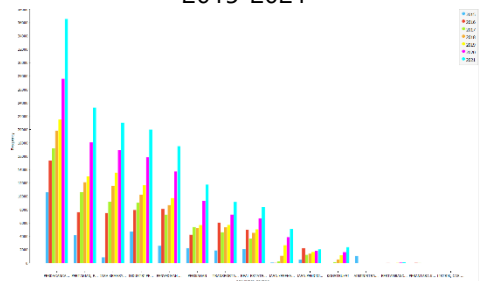
Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil penelitian, tidak dapat membuktikan hipotesis bahwa dua sektor tersebut berpengaruh secara signifikan.

Sektor perdagangan berpengaruh dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin secara signifikan, hal ini membuktikan hipotesis yang telah disusun. Sektor perdagangan masih mendominasi dalam penyaluran KUR, hal ini dapat menjadi kurang produktif

menyerap tenaga kerja. Penyaluran KUR yang terlalu dominan di sektor perdagangan juga dikhawatirkan dapat memicu inflasi yang tinggi di daerah sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Seperti pada data penyaluran KUR secara nasional, porsi penyaluran KUR pada periode 2015-2021 pada provinsi ini masih didominasi sektor Perdagangan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1**  
**Grafik penyaluran KUR per Sektor tahun 2015-2021**



Penyaluran KUR pada sektor perdagangan besar dan eceran cenderung tidak tepat sasaran untuk mendukung UMKM serta belum sesuai dengan tingkat skema pembiayaan yang seharusnya.

Sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah disusun. Secara khusus sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berpengaruh menurunkan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa adanya kesesuaian antara teori lingkaran kemiskinan dengan hasil penelitian. Teori lingkaran

kemiskinan mengatakan bahwa dengan adanya KUR dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan bekerja sebagai petani. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memberikan nilai tambah dari hasil pertaniannya, masyarakat tersebut yang membutuhkan pelatihan dan akses permodalan yang memadai.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmiati Iztihar (2012) yang menyatakan bahwa KUR berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Dimana penelitian yang dilakukan tersebut mengambil studi pada 34 provinsi di Indonesia dengan periode tahun 2014-2016.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Salah satu tujuan penyaluran KUR adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, setelah dilakukan penelitian pada lima sektor terbesar penyaluran KUR terdapat satu sektor yang meningkatkan jumlah penduduk miskin secara signifikan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Di sisi lain, terdapat dua sektor yang mengurangi tingkat kemiskinan namun tidak signifikan yaitu sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Selain itu, terdapat sektor pertanian dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya hiburan, dan perorangan lainnya mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dilakukan maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya mengalihkan penyaluran KUR dari sektor perdagangan menuju sektor produktif, seperti pertanian karena memiliki daya ungkit tinggi dalam ekosistem dari hulu ke hilir di dalam ikatan rantai nilai, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan ekspor.
2. Pemerintah dan lembaga penyalur KUR lebih memprioritaskan sektor ekonomi yang produktif, bernilai tambah, dan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.
3. Pemerintah harus menjamin perluasan akses layanan penyaluran KUR agar dapat menjangkau pelaku UMKM di area 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).
4. Pemerintah daerah dan lembaga penyalur lebih berperan aktif dalam melakukan kegiatan pendampingan usaha.
5. Pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur agar KUR tepat sasaran.

## **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut adalah penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan yaitu

penyaluran KUR pada 5 sektor. Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan.

## REFERENSI

- Bank Indonesia. 2015. Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Bank Indonesia.
- Hyland, J. 2000. 'Small business and enterprise development: questions about research methodology', *Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 5 (1), 5-18.
- Iztihar, Ilmiati. 2018. Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil, Dan Perekonomian di Indonesia. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Kuncoro, Mudrajat, 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford Basis Blackwell.
- Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Putra, Semara, I.G. 2013. Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. Skripsi: Bali. Universitas Udayana.
- Widyaresti, Enggar Pradipta dan Achma Hendra Setiawan. 2012. Analisis Peran BRI Unit Ketandan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi Pengusaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. *Diponegoro Journal of Economics* 1 (1) : 1-11.